

**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
SEKRETARIAT DPRD KAB. HALMAHERA UTARA
Jl. Kawasan Pemerintahan No.1B
Tobelo**



**LAPORAN KINERJA
(LKJ)
TAHUN 2021**



TOBELO 2021

KUESIONER TINGKAT KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

SB. = Sangat Baik

B. = Baik

CB. = Cukup Baik

KB. = Kurang Baik

PERTANYAAN		SB	B	CB	KB
1.	Apakah Pelayanan Pegawai Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD saat Rapat-rapat Sudah Berjalan dengan baik		X		
2.	Apakah Undangan Rapat Kerja bersama mitra disampaikan dengan baik kepada Anggota DPRD		X		
3.	Apakah Supporting Data dalam bentuk aturan yang berkaitan dengan Tugas Kedewanan sudah maksimal		X		
4.	Apakah Hak-hak Anggota DPRD terealisasi tepat waktu		X		
5.	Apakah penataan ruang serta keindahan ruang kerja Anggota DPRD tertata dengan baik		X		

Anggota DPRD,

LAMBERTUS KIALIAN, SH

KUESIONER TINGKAT KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

SB. = Sangat Baik

B. = Baik

CB. = Cukup Baik

KB. = Kurang Baik

PERTANYAAN		SB	B	CB	KB
1.	Apakah Pelayanan Pegawai Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD saat Rapat-rapat Sudah Berjalan dengan baik		✓		
2.	Apakah Undangan Rapat Kerja bersama mitra disampaikan dengan baik kepada Anggota DPRD		✓		
3.	Apakah Supporting Data dalam bentuk aturan yang berkaitan dengan Tugas Kedewanan sudah maksimal		✓	/	
4.	Apakah Hak-hak Anggota DPRD terealisasi tepat waktu		✓		
5.	Apakah penataan ruang serta keindahan ruang kerja Anggota DPRD tertata dengan baik		✓		

Anggota DPRD,

BENONI LARANGA

KUESIONER TINGKAT KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

SB. = Sangat Baik

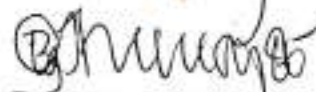
B. = Baik

CB. = Cukup Baik

KB. = Kurang Baik

PERTANYAAN		SB	B	CB	KB
1.	Apakah Pelayanan Pegawai Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD saat Rapat-rapat Sudah Berjalan dengan baik	✓			
2.	Apakah Undangan Rapat Kerja bersama mitra disampaikan dengan baik kepada Anggota DPRD		✓		
3.	Apakah Supporting Data dalam bentuk aturan yang berkaitan dengan Tugas Kedewanan sudah maksimal		✓		
4.	Apakah Hak-hak Anggota DPRD terealisasi tepat waktu		✓		
5.	Apakah penataan ruang serta keindahan ruang kerja Anggota DPRD tertata dengan baik		✓		

Anggota DPRD,



BUDIANTO GAWASALA, SH

KUESIONER TINGKAT KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

SB. = Sangat Baik

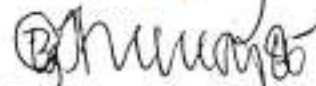
B. = Baik

CB. = Cukup Baik

KB. = Kurang Baik

PERTANYAAN		SB	B	CB	KB
1.	Apakah Pelayanan Pegawai Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD saat Rapat-rapat Sudah Berjalan dengan baik	✓			
2.	Apakah Undangan Rapat Kerja bersama mitra disampaikan dengan baik kepada Anggota DPRD		✓		
3.	Apakah Supporting Data dalam bentuk aturan yang berkaitan dengan Tugas Kedewanan sudah maksimal		✓		
4.	Apakah Hak-hak Anggota DPRD terealisasi tepat waktu		✓		
5.	Apakah penataan ruang serta keindahan ruang kerja Anggota DPRD tertata dengan baik		✓		

Anggota DPRD,



BUDIANTO GAWASALA, SH

KUESIONER TINGKAT KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

SB. = Sangat Baik

B. = Baik

CB. = Cukup Baik

KB. = Kurang Baik

PERTANYAAN		SB	B	CB	KB
1.	Apakah Pelayanan Pegawai Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD saat Rapat-rapat Sudah Berjalan dengan baik		✓		
2.	Apakah Undangan Rapat Kerja bersama mitra disampaikan dengan baik kepada Anggota DPRD		✓		
3.	Apakah Supporting Data dalam bentuk aturan yang berkaitan dengan Tugas Kedewanan sudah maksimal				✓
4.	Apakah Hak-hak Anggota DPRD terealisasi tepat waktu				✓
5.	Apakah penataan ruang serta keindahan ruang kerja Anggota DPRD tertata dengan baik				✓

Anggota DPRD,


 ONI PULO, ST

QUESTIONER TINGKAT KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

- B. = Sangat Baik**
- B. = Baik**
- B. = Cukup Baik**
- B. = Kurang Baik**

PERTANYAAN	SB	B	CB	KB
Apakah Pelayanan Pegawai Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD saat Rapat-rapat Sudah Berjalan dengan baik		☒		
Apakah Undangan Rapat Kerja bersama mitra disampaikan dengan baik kepada Anggota DPRD			☒	
Apakah Supporting Data dalam bentuk aturan yang berkaitan dengan Tugas Kedewanan sudah maksimal			☒	
Apakah Hak-hak Anggota DPRD terealisasi tepat waktu				☒
Apakah penataan ruang serta keindahan ruang kerja Anggota DPRD tertata dengan baik		☒		

Anggota DPRD,



FANKY DANNY TANTRI

DESIGNER TINGKAT KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

3. = Sangat Baik
 = Baik
 3. = Cukup Baik
 3. = Kurang Baik

PERTANYAAN	SB	B	CB	KB
Apakah Pelayanan Pegawai Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD saat Rapat-rapat Sudah Berjalan dengan baik .	✓			
Apakah Undangan Rapat Kerja bersama mitra disampaikan dengan baik kepada Anggota DPRD			✓	
Apakah Supporting Data dalam bentuk aturan yang berkaitan dengan Tugas Kedewanan sudah maksimal			✓	
Apakah Hak-hak Anggota DPRD terealisasi tepat waktu			✓	
Apakah penataan ruang serta keindahan ruang kerja Anggota DPRD tertata dengan baik		✓		

Anggota DPRD,



WILLEM M. MANERY, SH.,MH

SIONER TINGKAT KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

- = Sangat Baik
- = Baik
- = Cukup Baik
- = Kurang Baik

PERTANYAAN	SB	B	CB	KB
Apakah Pelayanan Pegawai Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD saat Rapat-rapat Sudah Berjalan dengan baik	✓			
Apakah Undangan Rapat Kerja bersama mitra disampaikan dengan baik kepada Anggota DPRD	✓			✗
Apakah Supporting Data dalam bentuk aturan yang berkaitan dengan Tugas Kedewanan sudah maksimal				✓
Apakah Hak-hak Anggota DPRD terealisasi tepat waktu				✓
Apakah penataan ruang serta keindahan ruang kerja Anggota DPRD tertata dengan baik			✓	

Anggota DPRD,

IRFAN SOEKOENAY, SH

ESIONER TINGKAT KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

- = Sangat Baik
- = Baik
- = Cukup Baik
- = Kurang Baik

PERTANYAAN	SB	B	CB	KB
Apakah Pelayanan Pegawai Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD saat Rapat-rapat Sudah Berjalan dengan baik	✓	✗		
Apakah Undangan Rapat Kerja bersama mitra disampaikan dengan baik kepada Anggota DPRD		✓		
Apakah Supporting Data dalam bentuk aturan yang berkaitan dengan Tugas Kedewanan sudah maksimal			✓	
Apakah Hak-hak Anggota DPRD terealisasi tepat waktu				✓
Apakah penataan ruang serta keindahan ruang kerja Anggota DPRD tertata dengan baik				✓

Anggota DPRD,

FAHMI MUSA, S.Pd

ESIONER TINGKAT KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

- = Sangat Baik
- = Baik
- = Cukup Baik
- = Kurang Baik

PERTANYAAN	SB	B	CB	KB
Apakah Pelayanan Pegawai Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD saat Rapat-rapat Sudah Berjalan dengan baik	✓	✗		
Apakah Undangan Rapat Kerja bersama mitra disampaikan dengan baik kepada Anggota DPRD		✓		
Apakah Supporting Data dalam bentuk aturan yang berkaitan dengan Tugas Kedewanan sudah maksimal			✓	
Apakah Hak-hak Anggota DPRD terealisasi tepat waktu				✓
Apakah penataan ruang serta keindahan ruang kerja Anggota DPRD tertata dengan baik				✓

Anggota DPRD,

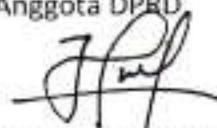
FAHMI MUSA, S.Pd

ESIONER TINGKAT KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

- = Sangat Baik
- = Baik
- = Cukup Baik
- = Kurang Baik

PERTANYAAN	SB	B	CB	KB
Apakah Pelayanan Pegawai Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD saat Rapat-rapat Sudah Berjalan dengan baik	✓			
Apakah Undangan Rapat Kerja bersama mitra disampaikan dengan baik kepada Anggota DPRD	✓			
Apakah Supporting Data dalam bentuk aturan yang berkaitan dengan Tugas Kedewanan sudah maksimal	✓			
Apakah Hak-hak Anggota DPRD terealisasi tepat waktu	✓			
Apakah penataan ruang serta keindahan ruang kerja Anggota DPRD tertata dengan baik	✓			

Anggota DPRD



JANLIS G. KITONG

KUESIONER TINGKAT KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

SB. = Sangat Baik

B. = Baik

CB. = Cukup Baik

KB. = Kurang Baik

PERTANYAAN		SB	B	CB	KB
1.	Apakah Pelayanan Pegawai Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD saat Rapat-rapat Sudah Berjalan dengan baik	✓			
2.	Apakah Undangan Rapat Kerja bersama mitra disampaikan dengan baik kepada Anggota DPRD			✓	
3.	Apakah Supporting Data dalam bentuk aturan yang berkaitan dengan Tugas Kedewanan sudah maksimal		✓		
4.	Apakah Hak-hak Anggota DPRD terealisasi tepat waktu		✓		
5.	Apakah penataan ruang serta keindahan ruang kerja Anggota DPRD tertata dengan baik			✓	

Anggota DPRD,



AURELIA INDAH MOLLE, SE

KUESIONER TINGKAT KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

SB. = Sangat Baik

B. = Baik

CB. = Cukup Baik

KB. = Kurang Baik

PERTANYAAN		SB	B	CB	KB
1.	Apakah Pelayanan Pegawai Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD saat Rapat-rapat Sudah Berjalan dengan baik		✓		
2.	Apakah Undangan Rapat Kerja bersama mitra disampaikan dengan baik kepada Anggota DPRD		✓		
3.	Apakah Supporting Data dalam bentuk aturan yang berkaitan dengan Tugas Kedewanan sudah maksimal		✓		
4.	Apakah Hak-hak Anggota DPRD terealisasi tepat waktu		✓		
5.	Apakah penataan ruang serta keindahan ruang kerja Anggota DPRD tertata dengan baik			✓	

Anggota DPRD,



BERTHY SIKAWI, SE

KUESIONER TINGKAT KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

SB. = Sangat Baik
 B. = Baik
 CB. = Cukup Baik
 KB. = Kurang Baik

PERTANYAAN		SB	B	CB	KB
1.	Apakah Pelayanan Pegawai Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD saat Rapat-rapat Sudah Berjalan dengan baik	✓			
2.	Apakah Undangan Rapat Kerja bersama mitra disampaikan dengan baik kepada Anggota DPRD	✓			
3.	Apakah Supporting Data dalam bentuk aturan yang berkaitan dengan Tugas Kedewanan sudah maksimal		✓		
4.	Apakah Hak-hak Anggota DPRD terealisasi tepat waktu	✓			
5.	Apakah penataan ruang serta keindahan ruang kerja Anggota DPRD tertata dengan baik	✓			

Anggota DPRD,



IRHAM HAKIM, SH.,M.Si

KUESIONER TINGKAT KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

SB. = Sangat Baik

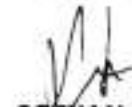
B. = Baik

CB. = Cukup Baik

KB. = Kurang Baik

PERTANYAAN		SB	B	CB	KB
1.	Apakah Pelayanan Pegawai Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD saat Rapat-rapat Sudah Berjalan dengan baik		✓		
2.	Apakah Undangan Rapat Kerja bersama mitra disampaikan dengan baik kepada Anggota DPRD		✓		
3.	Apakah Supporting Data dalam bentuk aturan yang berkaitan dengan Tugas Kedewanan sudah maksimal		✓		
4.	Apakah Hak-hak Anggota DPRD terealisasi tepat waktu		✓		
5.	Apakah penataan ruang serta keindahan ruang kerja Anggota DPRD tertata dengan baik			✓	

Anggota DPRD,



SOFYAN M. SALEH

KUESIONER TINGKAT KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

SB. = Sangat Baik

B. = Baik

CB. = Cukup Baik

KB. = Kurang Baik

PERTANYAAN		SB	B	CB	KB
1.	Apakah Pelayanan Pegawai Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD saat Rapat-rapat Sudah Berjalan dengan baik		✓		
2.	Apakah Undangan Rapat Kerja bersama mitra disampaikan dengan baik kepada Anggota DPRD		✓		
3.	Apakah Supporting Data dalam bentuk aturan yang berkaitan dengan Tugas Kedewanan sudah maksimal		✓		
4.	Apakah Hak-hak Anggota DPRD terealisasi tepat waktu		✓		
5.	Apakah penataan ruang serta keindahan ruang kerja Anggota DPRD tertata dengan baik			✓	

Anggota DPRD,



Drs. SAHRIL Hi. RAUF, M.PDI

KUESIONER TINGKAT KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

SB. = Sangat Baik

B. = Baik

CB. = Cukup Baik

KB. = Kurang Baik

PERTANYAAN		SB	B	CB	KB
1.	Apakah Pelayanan Pegawai Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD saat Rapat-rapat Sudah Berjalan dengan baik	X			
2.	Apakah Undangan Rapat Kerja bersama mitra disampaikan dengan baik kepada Anggota DPRD	X			
3.	Apakah Supporting Data dalam bentuk aturan yang berkaitan dengan Tugas Kedewanan sudah maksimal			X	
4.	Apakah Hak-hak Anggota DPRD terealisasi tepat waktu			X	
5.	Apakah penataan ruang serta keindahan ruang kerja Anggota DPRD tertata dengan baik			X	

Anggota DPRD,



SAMSUL BAHRI UMAR, S.Ag

KUESIONER TINGKAT KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

SB. = Sangat Baik

B. = Baik

CB. = Cukup Baik

KB. = Kurang Baik

PERTANYAAN		SB	B	CB	KB
1.	Apakah Pelayanan Pegawai Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD saat Rapat-rapat Sudah Berjalan dengan baik	✓			
2.	Apakah Undangan Rapat Kerja bersama mitra disampaikan dengan baik kepada Anggota DPRD		✓		
3.	Apakah Supporting Data dalam bentuk aturan yang berkaitan dengan Tugas Kedewanan sudah maksimal		✓		
4.	Apakah Hak-hak Anggota DPRD terealisasi tepat waktu			✓	
5.	Apakah penataan ruang serta keindahan ruang kerja Anggota DPRD tertata dengan baik			✓	

Anggota DPRD,



ASTRO LABADA

KUESIONER TINGKAT KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

SB. = Sangat Baik

B. = Baik

CB. = Cukup Baik

KB. = Kurang Baik

PERTANYAAN	SB	B	CB	KB
1. Apakah Pelayanan Pegawai Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD saat Rapat-rapat Sudah Berjalan dengan baik		✓		
2. Apakah Undangan Rapat Kerja bersama mitra disampaikan dengan baik kepada Anggota DPRD		✓		
3. Apakah Supporting Data dalam bentuk aturan yang berkaitan dengan Tugas Kedewanan sudah maksimal			✓	
4. Apakah Hak-hak Anggota DPRD terealisasi tepat waktu			✓	
5. Apakah penataan ruang serta keindahan ruang kerja Anggota DPRD tertata dengan baik		✓		

Anggota DPRD,



SELFI TJULUKU

KUESIONER TINGKAT KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

SB. = Sangat Baik

B. = Baik

CB. = Cukup Baik

KB. = Kurang Baik

PERTANYAAN		SB	B	CB	KB
1.	Apakah Pelayanan Pegawai Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD saat Rapat-rapat Sudah Berjalan dengan baik		✓		
2.	Apakah Undangan Rapat Kerja bersama mitra disampaikan dengan baik kepada Anggota DPRD		✓		
3.	Apakah Supporting Data dalam bentuk aturan yang berkaitan dengan Tugas Kedewanan sudah maksimal		✓		
4.	Apakah Hak-hak Anggota DPRD terealisasi tepat waktu		✓		
5.	Apakah penataan ruang serta keindahan ruang kerja Anggota DPRD tertata dengan baik		✓		

Anggota DPRD,



HELNI MOULY LEKE, SE

KUESIONER TINGKAT KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

SB. = Sangat Baik

B. = Baik

CB. = Cukup Baik

KB. = Kurang Baik

PERTANYAAN		SB	B	CB	KB
1.	Apakah Pelayanan Pegawai Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD saat Rapat-rapat Sudah Berjalan dengan baik	✓			
2.	Apakah Undangan Rapat Kerja bersama mitra disampaikan dengan baik kepada Anggota DPRD		✓		
3.	Apakah Supporting Data dalam bentuk aturan yang berkaitan dengan Tugas Kedewanan sudah maksimal		✓		
4.	Apakah Hak-hak Anggota DPRD terealisasi tepat waktu		✓		
5.	Apakah penataan ruang serta keindahan ruang kerja Anggota DPRD tertata dengan baik				✓

Anggota DPRD,


IRWAN JAM, SH

KUESIONER TINGKAT KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

SB. = Sangat Baik

B. = Baik

CB. = Cukup Baik

KB. = Kurang Baik

PERTANYAAN		SB	B	CB	KB
1.	Apakah Pelayanan Pegawai Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD saat Rapat-rapat Sudah Berjalan dengan baik		✓		
2.	Apakah Undangan Rapat Kerja bersama mitra disampaikan dengan baik kepada Anggota DPRD		✓		
3.	Apakah Supporting Data dalam bentuk aturan yang berkaitan dengan Tugas Kedewanan sudah maksimal				✓
4.	Apakah Hak-hak Anggota DPRD terealisasi tepat waktu			✓	
5.	Apakah penataan ruang serta keindahan ruang kerja Anggota DPRD tertata dengan baik		✓		

Anggota DPRD,

INGGRID PAPARANG, SE.,MBA

KUESIONER TINGKAT KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

SB. = Sangat Baik

B. = Baik

CB. = Cukup Baik

KB. = Kurang Baik

PERTANYAAN		SB	B	CB	KB
1.	Apakah Pelayanan Pegawai Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD saat Rapat-rapat Sudah Berjalan dengan baik	✓			
2.	Apakah Undangan Rapat Kerja bersama mitra disampaikan dengan baik kepada Anggota DPRD		✓		
3.	Apakah Supporting Data dalam bentuk aturan yang berkaitan dengan Tugas Kedewanan sudah maksimal		✓		
4.	Apakah Hak-hak Anggota DPRD terealisasi tepat waktu			✓	
5.	Apakah penataan ruang serta keindahan ruang kerja Anggota DPRD tertata dengan baik	✓			

Anggota DPRD,



RICHARD C. HOHAKAY, SE

KUESIONER TINGKAT KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

SB. = Sangat Baik

B. = Baik

CB. = Cukup Baik

KB. = Kurang Baik

PERTANYAAN		SB	B	CB	KB
1.	Apakah Pelayanan Pegawai Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD saat Rapat-rapat Sudah Berjalan dengan baik		✓		
2.	Apakah Undangan Rapat Kerja bersama mitra disampaikan dengan baik kepada Anggota DPRD			✓	
3.	Apakah Supporting Data dalam bentuk aturan yang berkaitan dengan Tugas Kedewanan sudah maksimal				✓
4.	Apakah Hak-hak Anggota DPRD terealisasi tepat waktu			✓	
5.	Apakah penataan ruang serta keindahan ruang kerja Anggota DPRD tertata dengan baik			✓	

Anggota DPRD,



YUSRIL BAILUSSY, S.Sos

KUESIONER TINGKAT KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

SB. = Sangat Baik

B. = Baik

CB. = Cukup Baik

KB. = Kurang Baik

PERTANYAAN		SB	B	CB	KB
1.	Apakah Pelayanan Pegawai Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD saat Rapat-rapat Sudah Berjalan dengan baik		✓		
2.	Apakah Undangan Rapat Kerja bersama mitra disampaikan dengan baik kepada Anggota DPRD			✓	
3.	Apakah Supporting Data dalam bentuk aturan yang berkaitan dengan Tugas Kedewanan sudah maksimal			✓	✓
4.	Apakah Hak-hak Anggota DPRD terealisasi tepat waktu			✓	
5.	Apakah penataan ruang serta keindahan ruang kerja Anggota DPRD tertata dengan baik		✓		

Anggota DPRD,



FAHMI DJUBA, ST

KUESIONER TINGKAT KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

SB. = Sangat Baik

B. = Baik

CB. = Cukup Baik

KB. = Kurang Baik

PERTANYAAN		SB	B	CB	KB
1.	Apakah Pelayanan Pegawai Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD saat Rapat-rapat Sudah Berjalan dengan baik		✓		
2.	Apakah Undangan Rapat Kerja bersama mitra disampaikan dengan baik kepada Anggota DPRD			✓	
3.	Apakah Supporting Data dalam bentuk aturan yang berkaitan dengan Tugas Kedewanan sudah maksimal			✓	
4.	Apakah Hak-hak Anggota DPRD terealisasi tepat waktu			✓	
5.	Apakah penataan ruang serta keindahan ruang kerja Anggota DPRD tertata dengan baik				

- ↓
- AC. Tidak dingin.
 - Tingkat ketopaman stop / Hanger lebih di tingkatkan

Anggota DPRD,



CHATRINE SOPUTAN, S.AP

KATA PENGANTAR

Puji syukur patut kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas kasihNya Laporan Kinerja (LKJP) Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 yang merupakan tahun ke lima dari pelaksanaan Rencana Strategik 2016 - 2021 dapat diselesaikan. Sebagai sebuah organisasi, pemerintah, dari tahun ke tahun kita semakin dituntut untuk memperlihatkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi. Keberhasilan sebuah organisasi banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan/komunikasi capaian kinerja instansi pemerintah yang harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJP) yang merupakan salah satu instrument dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang pada intinya mencakup tentang pelaporan ketercapaian hasil kegiatan yang dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran.

Kami sangat berterimakasih sekiranya ada kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan laporan ini, sebab kami sadar bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, namun harapan kami laporan ini dapat bermanfaat untuk bahan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD kabupaten Halmahera Utara sehingga dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang akan lebih maksimal.

Tobelo, 25 Januari 2022

Sekretaris DPRD



Abdul Azis ,S.STP

NIP.1980010221998101001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari beberapa faktor yang telah dikemukakan sebelumnya dan sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni memfasilitasi kegiatan DPRD dan mengkoordinasikan kegiatan DPRD dengan Pemerintah Daerah, maka visi yang ingin dicapai/ diwujudkan yaitu “ Terwujudnya Pelayanan Administrasi DPRD Secara Prima”.

Dalam mewujudkan misi yang diinginkan, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu memberikan pelayanan yang prima untuk menunjang peningkatan kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif yang aspiratif, transparan dan akuntabel.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka ditetapkan sasaran yang ingin dicapai yaitu terwujudnya kinerja lembaga legislatif yang optimal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan menjaga hubungan kerjasama yang harmonis antara pihak DPRD dengan Kepala Daerah beserta perangkatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

B. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kab. Halmahera Utara;

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Sekretariat DPRD kabupaten Halmahera Utara dimaksudkan untuk menyajikan capaian kinerja dari program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi kegiatan DPRD sehingga dapat semakin mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan *good end clean governance* selama tahun 2019. Hal ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja kepada *stake holder* dalam rangka penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas

D. Isu-Isu Strategis Sekretariat DPRD

Permasalahan yang sering muncul sehingga dijadikan isu yang strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya.
2. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.
3. Ketersediaan ruang publik sebagai bagian dari upaya menyediakan ruang aspirasi masyarakat.
4. Mengkoordinasikan rencana kegiatan dengan pihak terkait baik internal maupun eksternal.

D. Gambaran Umum Organisasi

a. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Setwan

Berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Utara mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara mempunyai fungsi:

- Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD;
- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan;
- Penyusunan perencanaan program kerjadi lingkup Sekretariat

DPRD;

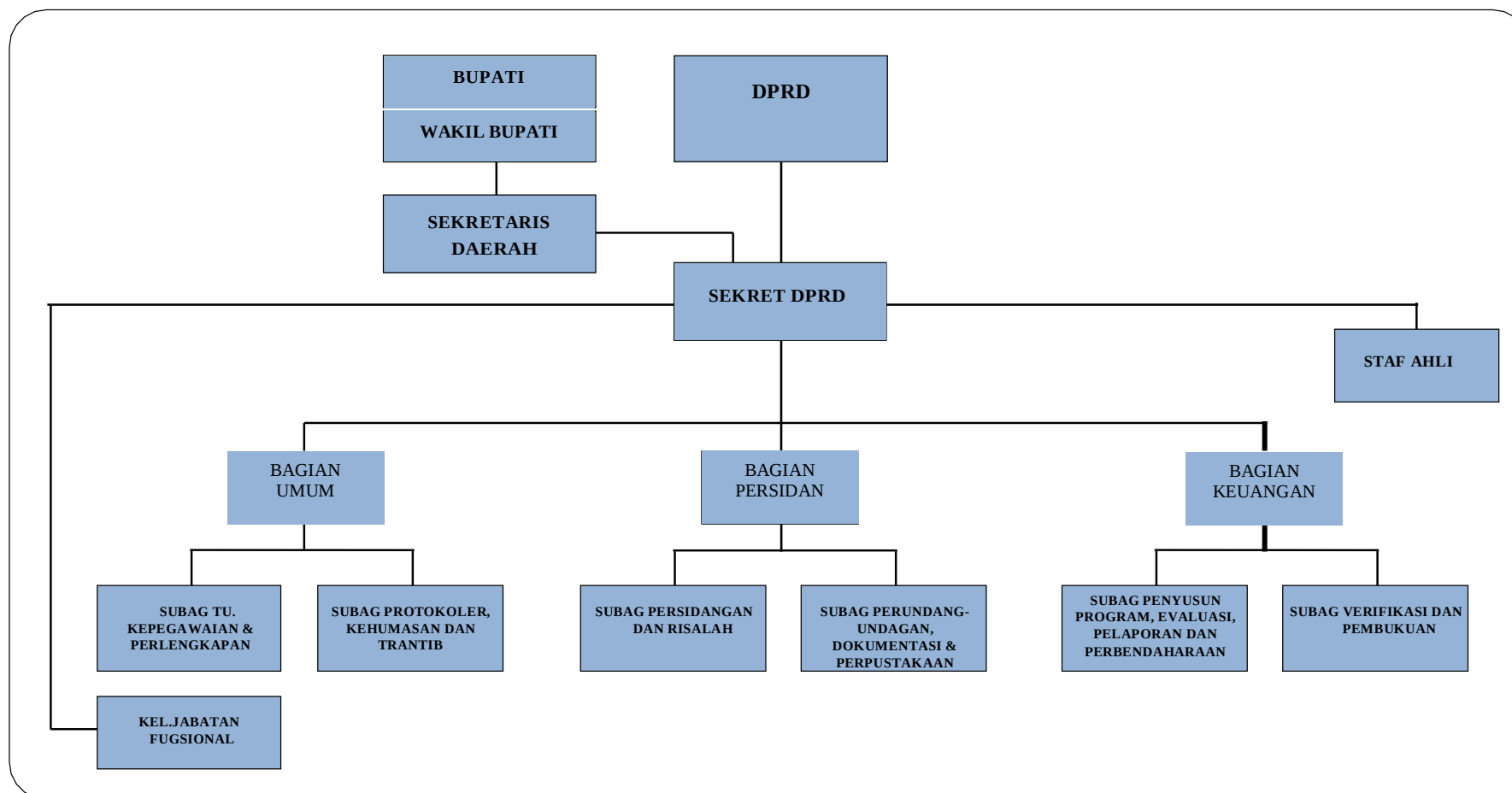
- Penyusunan rencana anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD bersama Pimpinan DPRD;
- Pengusulan anggaran pada lingkup DPRD dan Sekretariat DPRD;
- Pengoreksian dan penganalisaan serta pamarafan konsep produk Perundangan daerah yang menjadi garapan Sekretariat DPRD;
- Penelaan dan pengkoordinasian perumusan konsep kebijakan DPRD;
- Penyelenggaraan dan pengkoordinasian kegiatan penerangan, publikasi dan pemberitaan kegiatan DPRD serta urusan keprotokolan; dan
- Penyelenggaraan urusan rumah tangga, perjalanan dinas dan ketatausahaan DPRD;

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagaimana table tentang Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara berikut ini



2016 - 2021

STRUKTUR ORGANISASI SRKRETARIAT DPRD KABUPATEN HALMAHERA UTARA



Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara didukung oleh sumber daya manusia (SDM) 34 orang PNS yang beraneka ragam latar belakang pendidikan, usia, status kepegawaian maupun kepangkatan. Gambaran SDM Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Sekretariat DPRD Berdasarkan Eselon Jabatan

No .	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staff	TenagaKontra k	Jumlah
1.	Sekretaris DPRD	1	-	-	-	-	1
2.	Bagian Umum	-	1	2	9	56	68
3.	BagianPersidangan	-	1	1	5	4	11
4.	BagianKeuangan	-	1	2	10	3	16
J U M L A H		1	3	5	24	63	96

Sumber : Sub BagianKepegawaian SEKRETARIAT DPRD, Thn. 2021

Tabel 2.2
E. Kondisi Kepegawaian Sekretariat DPRD Berdasarkan Golongan

No .	Uraian	Go l. IV. c	Go l. IV .b	Go l. IV .a	Go l. III .d	Go l. III .c	Go l. III .b	Go l. III .a	Go l. II. d	Go l. II. c	Go l. II. b	Go l. II. a	Ju mla h
1	Sekretaris DPRD	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	BagianUmu m	-	-		2	1	2	-	2	5		-	12
3	BagianPersid angan	-	-	1	1	1	-	1	2	1	-	-	7
4	BagianKeua ngan	-	-	-	2	-	1	3	3	4	-	-	13
J U M L A H		-	1	1	5	2	3	4	7	10		-	33

F. Sumber : Sub BagianKepegawaian SEKRETARIAT DPRD, Thn. 2021

Tabel 2.3

4. Kondisi Kepegawaian Sekretariat DPRD Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Uraian	S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SMA/SMK	Jumlah
1.	Sekretaris DPRD	-	-	1	-	-	-	-	-	1
2.	Bagian Umum	-	-	4	-	1	-	-	7	12
3.	Bagian Persidangan	-	2	1	-	-	-	1	3	7
4.	Bagian Keuangan	-	1	3	-	1	-	-	8	13
5.	Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak)	-	1	10	-	2	-	-	50	63
JUMLAH		-	4	19	-	4	-	1	68	96

G. Sumber : Sub Bagian Kepegawaian SEKRETARIAT DPRD, Thn. 2021

Tabel 2.4

5. Kondisi Kepegawaian Sekretariat DPRD Berdasarkan Eselon & Jenis Kelamin

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Tenaga Kontrak	Jumlah
1.	Laki – Laki	1	2	3	9	38	53
2.	Perempuan	-	1	2	15	25	43
J U M L A H		1	3	5	24	63	96

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian SEKRETARIAT DPRD, Thn. 2021

Tabel 2.5

6. Kondisi Kepegawaian Sekretariat DPRD Berdasarkan Pendidikan & Jenis Kelamin

No.	Uraian	S2	S1	D3	D2/D1	SMA/SMK	Jumlah
1.	Laki – Laki	4	12	1	-	36	53
2.	Perempuan	-	7	4	-	32	43
J U M L A H		4	19	5	-	68	96

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian SEKRETARIAT DPRD, Thn. 2021

a. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Landasan Hukum

Maksud dan Tujuan

Isu Strategis Sekretariat DPRD

Gambaran Umum Organisasi

Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategik

Visi

Misi

Tujuan

Sasaran

Kebijakan

Program

Perjanjian Kinerja 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran Kinerja

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas

Keuangan BAB IV

PENUTUP

LAMPIRAN :

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEJIK

Rencana Stratejik merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategi ini khususnya pelaksanaan program unggulan yaitu Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah adalah hasil yang telah dicapai selama tahun 2021, yang diimplementasikan kedalam visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara

Visi :

“ Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Melalui Pembangunan Berkelanjutan Dengan Inovasi Dan Investasi Dalam Kebersamaan yang Berkeadilan ”

Misi :

1. Memperkuat Pelayanan dibidang kesehatan ,pendidikan dan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk termasuk pemajuan pendidikan karakter dan kebudayaan daerah .
2. Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup
3. Pembangunan Perekonomian Daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif yang berkelanjutan pada sektor pertanian,perikanan ,kelautan dan pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi
4. Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, maka diharapkan Sekretariat DPRD dapat mendukung pelaksanaan Misi 4 (kesatu) yaitu :

5. "Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan
" Misi tersebut difokuskan pada penataan kelembagaan dan peningkatan layanan public dengan penerapan nilai –nilai good governance dan clean government

Tujuan

Ada beberapa tujuan yang ditetapkan berdasarkan penjabaran dari misi di atas, yaitu :

1. Mewujudkan pelayanan Administrasi secara cepat, tepat sasaran, terarah serta efektif dan efisien.
2. Meningkatkan kedisiplinan aparatur agar bias melaksanakan tugas secara profesional.
3. Meningkatkan Kapasitas personal melalui pendidikan, workshop, lokakarya serta studi referensi dengan menggunakan narasumber dan referensi yang relevan untuk mewujudkan SDM yang berkualitas guna memenuhi kualitas diri sebagai aparatur dalam daya saing global.
4. Mewujudkan penerapan administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan evaluative terhadap semua hasil kegiatan sebagai bentuk laporan capaian kinerja, sekaligus untuk mengukur ikhtisar realisasi kerja SKPD.
5. Menghasilkan Peran Lembaga DPRD yang prima, professional melalui pelaksanaan berbagai kegiatan-kegiatan tugas dan fungsi DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik guna mendukung sinergitas eksekutif dan legislative sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.

Sasaran

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan peralatan perkantoran dalam memberikan pelayanan publik.
2. Meningkatnya Fasilitas sarana dan prasarana yang dapat

mendukung dan meningkatkan kinerja pegawai Sekretariat Dewan.

3. Meningkatnya kemampuan disiplin dalam memberikan pelayanan public secara profesional, efektif, efisien dan proaktif serta esponsif.
4. Meningkatnya kapasitas SDM pegawai dalam memahami tupoksi, serta kemampuan dalam melaksanakan tugas secara profesional.
5. Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.

Kebijakan

Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan kemampuan pengelolaan administrasi perkantoran yang memungkinkan terlaksananya berbagai pekerjaan secara cepat, tepat, efektif dan efisien;
2. Mewujudkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan DPRD yang *representatif*;
3. Memberikan kesempatan bagi SDM untuk mengikuti workshop, seminar, lokakarya dan kegiatan akademik yang dapat meningkatkan kualitas SDM;
4. Penyusunan laporan realisasi hasil pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi laporan pekerjaan;
5. Menfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara profesional.

Program

Program merupakan implementasi nyata dari kebijakan- kebijakan strategis. Program Sekretariat DPRD Kab.Halut yang harus dilaksanakan dalam tahun anggaran 2021 terdiri dari 2 (Dua) program termasuk di dalamnya 1 (satu) program unggulan, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan FUNgsi DPRD

Perjanjian Kinerja (PK)2021

Perjanjian Kinerja pegawai aparatur sipil Negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif,

tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek kebawah dan kesamping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu penandatanganan Perjanjian Kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapih dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisi penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati dengan pimpinan SKPD atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun tujuan dibuatnya perjanjian kinerja dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
- d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja yang dilakukan antara Bupati Halmahera Utara dan Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Utara dapat dilihat sebagaimana.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Kualitas pelayanan Dalam rangka memfasilitasi Setiap kegiatan Pimpinan& Anggota DPRD	1. Kepuasan Pimpinan & Anggota DPRD Halmahera Utara terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	90 %	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	1.724.961.500
		2. Presentase pelaksanaan rapat-rapat dewan tepat waktu 9 pembahasan RAPBD / RAPBD-P, Pembahasan LKPJ KDH	95 %	2. Progrm Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan kinerja/pemberi amanah. Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera utara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra maupun Rencana Tahunan 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu tanggungjawab organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan penetapan dan pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara tahun anggaran 2021, maka dalam mengukur capaian kinerja dimaksud digunakan skala pengukuran ordinal sbb:

No	Jumlah Nilai	Kategori
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% s/d 100%	Baik (B)
3	55% s/d 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Hasil pengukuran ini diharapkan dapat digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat efisiensi program dan pendanaan guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja Sekretariat DPRD, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan

kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi ke depan yang perlu dilaksanakan.

Secara garis besar efisiensi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, tergambar dalam Tabel berikut:

No	Kategori	Persentase (%)
1.	Sangat efisien (SE)	>100
2.	Efisien (E)	75 sd 100
3.	Kurang efisien (KE)	55 sd 75
4.	Tidak efisien (TE)	<50
	Total	

3.2 ANALISA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM SERTA PENDANAAN 2021

Analisa capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan alat ukur yaitu indikator-indikator kinerja yang telah dirumuskan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil pengukuran atas indikator tersebut dilakukan analisa dan evaluasi kinerja untuk mengidentifikasi factor-faktor penyebab keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja, yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya potensi dan masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD kedepan.

Tabel. 3
REKAPITULASI PENGUKURAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	Capain
I	Terwujudnya kualitas pelayanan dalam rangkai memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	Persentase kepuasan pimpinan & dan anggota DPRD Kab. Halut terhadap kinerja sekretariat DPRD	95%	100%	95%
		Persentase pelaksanaan rapat-rapat dewan tepat waktu (pembahasan RAPBD/RAPBD-P, pembahasan LJPB KDH)	95%	100%	95%

II	Meningkatnya kinerja-kinerja secretariat dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat kepada DPRD	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	85%	100%	85%
III	Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase ranperda yang ditetapkan menjadi perda	85%	100%	85%

Sasaran Strategis 1:

“Terwujudnya kualitas pelayanan dalam rangkai memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD”

Sasaran Strategis ini diukur dengan 2 (dua) table dalam perjanjian kinerja dengan katagori capaian baik karena mencapai nilai 105% dan 117% sebagaimana pada table dibawah ini:

N O	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020			Tahun 2021			Perbandingan		Jangka menengah 2022
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
I	• Persentasi kepuasan pimpinan & anggota DPRD Kab. Halut terhadap kinerja 4able4tor4t DPRD	95%	100 %	105 %	85%	100%	117%	100%	12%	90%
	• Persentasi pelaksanaan rapat-rapat dewan tepat waktu (pembahasan RAPBD/RAPBD-P, pemkahasan LJPk KDH)	95%	100 %	105 %	85%	100%	117%	100%	12%	90%

a. Deskripsi sasaran dan capaian kinerja sasaran

Porsentase kepuasan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara terhadap kinerja Sekretariat DPRD atau Table pertama ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah anggota dewan yang puas dengan jumlah keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dikali 100%. Untuk mewujudkan sasaran strategis dimaksud dibuat kusioner dalam bentuk pertanyaan dan dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD sebanyak 25 orang sehingga dapat mengetahui berapa banyak yang merasa puas dan tidak meras puas terhadap pelayanan dimaksud.

Melalui kusioner tersebut dengan jumlah 25 anggota DPRD merasa puas dengan pelayanan, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah 25 (dua puluh lima) Anggota DPRD telah puas terhadap pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk itu dari target 85% telah terealisasi dengan capaian 117% pada tahun 2021, jika dibandingkan tahun 2020 capaiannya sebesar 105% sebagaimana pada Table diatas.

Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja dan sasarannya telah tercapai.

Adapun upaya Sekretariat DPRD mempertahankan target atas hasil yang dicapai yakni adanya dukungan dan komitmen bersama dari seluruh Pegawai Sekretariat dan anggota DPRD dalam menyajikan informasi maupun melaksanakan tugas memperhatikan Tupoksi dan keputusan terhadap perundang-undangan serta didukung oleh sumber daya yang berkompeten.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara untuk terwujudnya kualitas pelayanan dalam rangkai memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD dengan table pertama yang didukung oleh program sebagai berikut:

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota

Pagu anggaran untuk program diatas sebesar Rp. 24.528.968.550 (Dua puluh empat miliar lima ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh delapan lima ratus lima puluh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. **22.423.717.002** atau persentase sebesar 91,41%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 117% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 91,41%, maka diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 127,99%. Dengan pencapaian tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

c. Deskripsi sasaran dan capaian kinerja sasaran

Persentase pelaksanaan rapat – rapat dewan tepat waktu (Pembahasan RAPBD/RAPBDP dan Pembahasan LKPJ KDH) atau table kedua ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah rapat yang terlaksana tepat waktu dengan jumlah rapat yang terjadwalkan dikali 100%. Untuk mewujudkan sasaran strategis dimaksud, maka pelaksanaan rapat tepat waktu sebanyak 394 sedangkan rapat yang terjadwalkan sebanyak 412 dikali 100% dengan realisasi capaian sebesar 95,63% dan uraiannya dapat dilihat pada table dibawah ini:

NO	JENIS RAPAT	JUMLAH		KET
		TARGET	REALIASI	
1	Rapat Paripurna	18	18	
2	Rapat Paripurna Istimewa	1	1	
3	Rapat Konsultasi	10	10	

4	Rapat Badan Musyawarah	10	10	
5	Rapat Komisi	175	163	
6	Rapat Gabungan Komisi	4	4	
7	Rapat Badan Anggaran	13	13	
8	Rapat BAPEMPERDA	15	8	
9	Rapat Pansus, Panja, Tim Kerja	-	-	
10	Rapat Kerja	150	150	
11	Rapat Dengar Pendapat	13	13	
12	Rapat Dengar Pendapat Umum	4	4	
	Jumlah	412	394	

Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja dan sasarannya telah tercapai.

Adapun upaya Sekretariat DPRD mempertahankan target atas hasil yang dicapai yakni adanya dukungan dan komitmen bersama dari seluruh Pegawai Sekretariat dan anggota DPRD dalam menyajikan informasi maupun melaksanakan tugas memperhatikan Tupoksi dan keputusan terhadap perundang-undangan serta didukung oleh sumber daya yang berkompeten.

d. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara dalam rangka terwujudnya kualitas pelayanan dalam rangkalah memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD dengan indikator kedua yang didukung 1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota

Pagu anggaran untuk program diatas sebesar Rp. 803.220.000(Delapan ratus Tiga Juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 803.220.000 atau persentase sebesar 100%, Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 117% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 100%, maka diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 85,47%. Dengan pencapaian tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Efisien**.

Sasaran Strategis 2:

"Meningkatnya kinerja kinerja Sekretariat DPRD dalam

memfasilitasi aspirasi masyarakat kepada DPRD”

Sasaran Strategis ini diukur dengan 1 (satu) indikator dalam perjanjian kinerja dengan katagori capaian baik karena mencapai nilai 100% sebagaimana pada tabel dibawah ini:

N O	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020			Tahun 2021			Perbandingan		Jangkah meneng ah
		Target	Realis asi	Capaian	Target	Realisa si	Capaia n	Realis asi	Capaian	
I	Porsentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	85%	100%	85%	100%	100%	100%	0%	15%	100%

a. Deskripsi sasaran dan capaian kinerja sasaran

Jumlah aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD kabupaten Halmahera Utara dihitung dari banyaknya aspirasi yang ditindaklanjuti berbanding jumlah aspirasi yang masuk dikali 100% atau aspirasi yang ditindaklanjuti sebanyak 6 dibagi aspirasi yang masuk sebanyak 6 dikali 100% maka, aspirasi yag ditindaklanjuti tahun tahun 2021 dengan capain sebesar 100%. Aspirasi yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis melalui kegiatan jaring asmara Anggota DPRD pada saat reses di masing-masing daerah pemilihan dalam jangkah waktu 3 (tiga) kali setahun, namun ada aspirasi yang disampaikan langsung ke kantor DPRD Kabupaten Halmahera Utara.

Hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja dan sasarannya telah tercapai.

Adapun upaya Sekretariat DPRD mempertahankan target atas hasil yang dicapai yakni adanya dukungan dan komitmen bersama dari seluruh Pegawai Sekretariat dan anggota DPRD dalam menyajikan informasi maupun melaksanakan tugas memperhatikan Tupoksi dan keputusan terhadap perundang-undangan serta didukung oleh sumber daya yang berkompeten.

e. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara dalam rangka meningkatkan kinerja-kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat kepada DPRD dengan indikator persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti yang

didukung oleh program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Pagu anggaran untuk program diatas sebesar Rp. 2.984.176.000 (dua miliar Sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.442.270.000) atau persentase sebesar 81,84,%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 100% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 81,84%, maka diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 81,84%. Dengan pencapaian tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Efisien**.

Sasaran Strategis 3:

“Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah”

Sasaran Strategis ini diukur dengan 1 (satu) indikator dalam perjanjian kinerja dengan kategori capaian baik karena mencapai nilai 100% sebagaimana pada tabel dibawah ini:

N O	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020			Tahun 2021			Perbandingan		Jangkah meneng ah
		Target	Realis asi	Capaia n	Target	Realisa si	Capaia n	Realis asi	Capaian	
	Porsentase ranperda yang ditetapkan menjadi perda	85%	80%	94,11 %	100%	100%	100%	20%	66%	100%

a. Deskripsi sasaran dan capaian kinerja sasaran

Dalam meningkatkan kapasitas lembaga Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara, anggota DPRD dalam melaksanakan tugas telah melakukan penyusunan rencana peraturan daerah dan penetapan. Pada tahun 2021 DPRD telah menyusun rancangan peraturan daerah sebanyak 3 Inisiatif DPRD, tidak ada pembahasan dan Penetapan Peraturan daerah. Dari perhitungan dimaksud yaitu dari jumlah rancangan peraturan daerah yang ditetapkan dibanding jumlah rancangan peraturan daerah yang diselesaikan pembahasannya dikali 100%, maka capaian kinerja sebesar 0%.

Dalam penyelesaian rancangan peraturan daerah untuk tahun 2021 peraturan daerah inisiatif DPRD belum dapat diselesaikan pembahasan hal ini disebabkan keterbatasan waktu dan sangat banyak tugas dan tanggungjawab.

Adapun upaya Sekretariat DPRD untuk mencapai target yakni lebih meningkatkan dukungan dan komitmen bersama dari seluruh Pegawai Sekretariat dan anggota DPRD serta dapat meningkatkan dan mengatur waktu sesuai dengan jadwal maupun melaksanakan tugas memperhatikan Tupoksi dan keputusan terhadap perundang-undangan serta didukung oleh sumber daya yang berkompeten.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan daerah dengan indikator persentase rancangan peraturan daerah yang ditetapkan menjadi peraturan daerah didukung oleh program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Pagu anggaran untuk kegiatan diatas sebesar Rp. 1.098.466.150 (satu miliar sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 504.920.000 atau persentase sebesar 46,58%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 100% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 46,58%, maka diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 46,58%. Dengan pencapaian tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Tidak Efisien**.

Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara dianggarkan melalui APBD Kabupaten Halmahera Utara pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara dengan total nilai.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap misi Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021 dapat dilihat dibawah ini :

Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan Dalam Rangka Memfasilitasi Setiap Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Program penunjang urusan Pemerintahan daerah kabupaten / kota	Rp. 24.528.968.550	Rp.22.423.717.002	91,41
	1. Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 8.825.662	Rp. 6.000.000	100%
	2. Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp. 2.980.947.636	Rp.	
	3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rp. 293.245.810	Rp. 45.137.500	15,39
	4. Administrasi umum perangkat daerah	Rp. 1.286.155.313	Rp. 1.195.020.000	92,91
	5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Rp. 154.500.000	Rp. 140.000.000	90,61
	6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Rp. 1.465.476.298	Rp. 1.217.582.345	83,08
	7. Pemeliharaan barang milik daerah urusan penunjang pemerintah daerah	Rp. 975.917.000	Rp. 820.110.200	84,03
	8. layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Rp. 16.642.476.298	Rp. 16.816.590.046	98,96
	9. Layanan administrasi DPRD	Rp. 721.150.000	Rp. 261.200.000	36,21
2	Program Dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Rp. 17.899.062.150	Rp. 15.314.787.743	85,56
	1. Peningkatan kapasitas DPRD	Rp. 1.978.920.000	Rp.1575.935.573	

	2. Fasilitasi Tugas DPRD	Rp. 11.839.500.000	Rp. 10.531.872.220	
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitas Aspirasi Masyarakat Kepada Dewan				
1	Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan fungsi DPRD 1. penyerapan dan penghimpunan Aspirasi masyarakat	Rp. 2.984.176.000	Rp. 2.491.870.000	83,50

Dari tabel di atas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021 sebagaimana yang diharapkan.

Laporan dimaksud dapat menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai melalui 2 (Dua) program , 13 (Tiga Belas) kegiatan Dan 30 (dua Puluh Sembilan) Sub Kegiatan baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan sebagaimana pada table dibawah ini :

No	Katagori	Sasaran	Prsentase
1	Baik sekali (BS)	1, 2 dan 3	117%, 100% dan 100%
2	Baik (B)		
3	Cukup (C)		

Dalam tahun anggaran 2021, untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021 sebesar Rp.42.428.030.700. sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.37.738.504.545 atau dengan serapan dana APBD mencapai 88,95%

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara kepada pihak-pihak terkait, baik sebagai stakeholder maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Halmahera Utara.

Tobelo, 25 Januari 2022
Sekretaris DPRD Kab.Halmahera Utara



ABDUL AZIS,S.STP
NIP.198010221998101001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanat atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021 ini disusun. Laporan ini menyajikan capaian kinerja dari Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara selama tahun 2021 yang merupakan amanat yang diemban oleh organisasi.

Laporan Akuntabilitas ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang peningkatan kapasitas lembaga DPRD, tentunya bukan hanya menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga pemerintahan tapi juga dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum. Mewujudkan aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih merupakan tujuan utama Sekretariat DPRD kabupaten Halmahera Utara.

Namun demikian, selain beberapa keberhasilan di atas, Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara juga mencatat adanya beberapa ketidakberhasilan dalam mewujudkan aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih. Beberapa keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan birokrasi menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara belum sepenuhnya berhasil. Hal ini akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada Sekretariat DPRD kabupaten Halmahera Utara dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja dimasa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan organisasi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD NOMOR ... TENTANG POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA UTARA MASA PERSIDANGAN KE SATU TAHUN 2021-2022

NO	Program/kegiatan	Permasalahan	Asumsi	Volume	Lokasi	OPD terkait	Pengusul			
							Fraksi	Nama Anggota	Komisi	Dapil
1	Air bersih	Aliran air dari PDAM sering mengalami kemacetan	Kebutuhan air bersih	1 paket	Desa MKCM (Daeo)	PDAM	Demokrat	Oni Pulo, ST	III	I
2	Pusat penyaluran penampungan air bersih	Aliran air dari PDAM sering mengalami kemacetan	Kebutuhan air bersih	1 paket	Desa Gamsungi	PDAM	Demokrat	Oni Pulo, ST	III	I
3	Drainase	Belum ada drainase sehingga rumah warga tergenang air di musim hujan	Pembuatan drainase agar terhindar dari genangan air	200 M	Desa Kupa-Kupa	Dinas PUPR	Demokrat	Oni Pulo, ST	III	I
4	Pengadaan Bus	Memfasilitasi anak sekolah agar tidak terlambat ke sekolah dan meringankan biaya transportasi	Menunjang transportasi	1 unit	Desa Kupa-Kupa	Dinas Perhubungan	Demokrat	Oni Pulo, ST	III	I
5	Peningkatan jalan Hotmix	Jalan alternative lingkar desa	Akses jalan lingkar desa	1 Km	Desa Kupa-Kupa	Dinas PUPR	Demokrat	Oni Pulo, ST	III	I
6	Dua unit MCK	Guru dan siswa kesulitan akses	Guru dan murid tidak harus pulang ke rumah	2 unit	Desa Tolonuo	Dinas PUPR	Gerakan amanat hatinurani	Irham Hakim, SH,M,Si	II	I
7	Talud	Kesulitan warga saat air pasang	Sebelum merusak halaman rumah warga	200 meter	Desa Tolonuo	Dinas PUPR	Gerakan amanat hatinurani	Irham Hakim, SH,M,Si	II	I
8	Jalan Setapak	Rusak Berat	Askes warga tersendat		Desa Tolonuo	Dinas PUPR	Gerakan amanat hatinurani	Irham Hakim, SH,M,Si	II	I
9	Tempat pengasapan ikan Pengadaan tempat pengasapan ikan	Membusuknya hasil tangkapan Nelayan	Hasil tangkap di olah kembali	1 unit (6x6)	Desa Tolonuo	Dinas PUPR	Gerakan amanat hatinurani	Irham Hakim, SH,M,Si	II	I

10	Tempat pengajian alquran	Belum ada wadah belajar	Pemusatan pembelajaran	1 unit	Desa Tolonuo	Bagian kesra	Gerakan amanat hatinurani	Irham Hakim, SH,M,Si	II	I
11	Sarana olahraga bola	rusak	rehap	100x100	Desa Tolonuo	Dinas Pemudah dan Olraga	Gerakan amanat hatinurani	Irham Hakim, SH,M,Si	II	I
12	Jalan hotmix	rusak	pengaspalan	1 Km	Desa Gorua	Dinas PUPR	Gerakan amanat hatinurani	Irham Hakim, SH,M,Si	II	I
13	pemberdayaan	petani	Penyediaan bibit dan pupuk	100 bungkus	Desa Gorua	Dinas pertanian	Gerakan amanat hatinurani	Irham Hakim, SH,M,Si	II	I
14	pemberdayaan	peternakan	Penyediaan anak ayam	500 ekor	Desa Gorua	Dinas peternakan	Gerakan amanat hatinurani	Irham Hakim, SH,M,Si	II	I
15	Drainase	banjir	pengadaan	100 meter	Desa Gorua	Dinas PUPR	Gerakan amanat hatinurani	Irham Hakim, SH,M,Si	II	I
16	Alat pertanian	kesulitan	pengadaan	1 unit	Desa Gorua	Dinas pertanian	Gerakan amanat hatinurani	Irham Hakim, SH,M,Si	II	I
17	Talut	Abrasi	Terganggu keseimbangan alam di daerah pantai	I KM	Ds. Kakara Pulo	PU	Restorasi pembangunan	Lambertus Kialian,SH	I	I
18	Pembangunan Rumah adat	Bangunan baru	Pengenbangan Budaya	I Unit	Ds. Kakara Pulo	PU	Restorasi pembangunan	Lambertus Kialian,SH	I	I
19	Kartu Sehat	RSUD tidak lagi melayani kartu sehat dari masyarakat sejak 2 tahun			Ds. Kakara Pulo	Dinas Kesehatan	Restorasi pembangunan	Lambertus Kialian,SH	I	I

20	PLN.	Masyarakat mengharapkan jasa PLN	Instalasi Listrik suda masuk di Rumah masyarakat	Arus listrik setiap hari	Ds. Kakara Pulo	PLN	Restorasi pembangunan	Lambertus Kialian,SH	I	I
21	Pendidikan	Bantuan Beasiswa	Untuk masyarakat tidak mampu		Ds. Kakara Pulo		Restorasi pembangunan	Lambertus Kialian,SH	I	I
22	Drainase	Rusak berat	Mengurangi kemungkinan banjir	100 M	Ds. Mawea	PU	Restorasi pembangunan	Lambertus Kialian,SH	I	I
23	Aspal	Pembuatan baru	Suda ada badan jalan	3 KM	Ds. Mawea	PU	Restorasi pembangunan	Lambertus Kialian,SH	I	I
24	Pembuatan deker dan gorong gorong	Sering terjadinya peluapan air pada saat hujan yang menyebabkan banjir	Dengan adanya gorong gorong sehingga tidak terjadinya peluapan air di pemukiman warga desa gosoma	10 M	Desa Gosoma Kec Tobelo	Dinas PUPR	Golkar	Willem M Manery, SH MH	I	I
25	Rehabilitasi 3 ruang kelas SD Inpres Talaga Paca	Sudah tidak layak terpakai dan tidak menunjang aktifitas belajar mengajar	Dengan direhabilitasinya ruang kelas dapat dapat menunjang siswa belajar dengan layak	3 ruang	Desa Talaga Paca Kec Tobsel	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Golkar	Willem M Manery, SH MH	I	I
26	Normalisasi sungai	Sering terjadinya penyumbatan air sungai yang menyebabkan meluapnya air sungai	Dinormalisasinya perluasan sungai maka tidak terjadinya penyumbatan air	500 M	Desa Talaga Paca Kec Tobsel	Dinas PUPR	Golkar	Willem M Manery, SH MH	I	I
27	Pembuatan drainase	Terjadi gengan air dimusim hujan dan rumah warga terendam	Tidak ada saluran air	400 m	Desa Kakara	Dinas PUPR	Gerakan Amanat Hatinurani	Astro Labada	I	I
28	Pembuatan gorong gorong	Terjadi genangan di musim hujan	Tidak ada saluran air	3 unit	Desa Kakara	Dinas PUPR	Gerakan Amanat Hatinurani	Astro Labada	I	I

29	Bantuan bibit tanaman	Tidak ada bibit	Pengadaan bibit	1 paket	Desa Kakara Baru	Dinas Pertanian	Gerakan Amanat Hatinurani	Astro Labada	I	I
30	Pembuatan talud	Disaat air pasang terjadi abrasi	Terhindar dari ancaman abrasi	450 m	Desa Kakara Baru	Dinas PUPR	Gerakan Amanat Hatinurani	Astro Labada	I	I
31	Pembuatan drainase	Terjadi gengan air dimusim hujan dan rumah warga terendam	Tidak ada saluran air	1,600 m	Desa Kakara Baru	Dinas PUPR	Gerakan Amanat Hatinurani	Astro Labada	I	I
32	Pembuatan jembatan	Bila banjir menghambat aktifitas warga khususnya petani	Membangun jembatan agar memudahkan warga beraktifitas	12 M	Desa Tomahalu, sungai parara	Dinas PUPR	PKPI	Fanky Danny Tantry	II	I
33	Peningkatan jalan masuk ke lokasi pariwisata	Menghambat wisatawan yang melewati karena jalan yang masih berbatu	Perlu adanya perhatian Pemerintah Daerah akses jalan masuk ke tempat wisata	300 M	Desa Tomahalu/ Desa Kakara B	Dinas PUPR	PKPI	Fanky Danny Tantry	II	I
34	Pengadaan perahu nelayan	Para nelayan masih kesulitan karena tidak tersedianya perahu penangkapan ikan	Untuk memudahkan para nelayan/kelompok nelayan	1 buah/ 2 ton	Desa Tomahalu	Dinas Kelautan dan Perikanan	PKPI	Fanky Danny Tantry	II	I
35	Pengadaan buku buku perpustakaan Desa	Masih kurangnya fasilitas buku buku para pemuda tomahalu	Untuk menunjang SDM bagi para pemuda	1 paket	Desa Tomahalu	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	PKPI	Fanky Danny Tantry	II	I
36	Pengadaan bibit pala	Kurangnya aktifitas para kelompok tani	Adanya bibit untuk para petani maka bias menunjang pendapatan para petani	500 pohon	Desa Tomahalu	Dinas Pertanian	PKPI	Fanky Danny Tantry	II	I
37	Pengadaan pupuk	Para petani tidak kesulitan untuk mengurus tanaman khususnya tanaman bulanan	Adanya pupuk para petani mendapatkan hasil pertanian dengan	1 paket	Desa Tomahalu	Dinas Pertanian	PKPI	Fanky Danny Tantry	II	I

			baik dan memuaskan							
38	Pembangunan jalan sirtu	Perlu adanya peningkatan untuk memudahkan aktifitas warga	Menyulitkan para warga yang melintasnya	2,5 M	Disa Pitu RT 01,07,08	Dinas PUPR	PKPI	Fanky Danny Tantry	II	I
39	Pembuatan paving blok	Belum tertata baik tanaman desa pitu agar lebih baik kedepan	Ada perhatian dari pihak pemerintah daerah	1000 M	Desa Pitu	Dinas PUPR	PKPI	Fanky Danny Tantry	II	I
40	Peningkatan jalan	Belum dihotmix	Harus dihotmix	500 M	Desa Sukamaju Kec Tobelo Barat	Dinas PUPR	PKB	Irfan Soekoenay, SH	I	I
41	Peningkatan jalan	Belum dihotmix	Harus dihotmix	1000 M	Desa Mahia Kec Tobteng 2 titik	Dinas PUPR	PKB	Irfan Soekoenay, SH	I	I
42	Bantuan Dana	Untuk yayasan sinode		100 juta	Desa Gamsungi Kec Tobelo	BKAD	PKB	Irfan Soekoenay, SH	I	I
43	Pembangunan drainase	Terjadi genangan air ketika musim hujan	Tidak ada saluran air	500 M	Desa Rawajaya Kec. Tobelo	Dinas PUPR	Restorasi Pembangunan	Heni Moudy Leke, SE	I	I
44	Bantuan peralatan perbengkelan	Terjadi pengangguran masyarakat yang memiliki potensi bidang perbengkelan	Tidak memiliki peralatan perbengkelan yang memadai	2 unit	Desa Rawajaya Kec. Tobelo	Dinas Sosial	Restorasi Pembangunan	Heni Moudy Leke, SE	I	I
45	Bantuan peralatan pertukangan kayu	Terjadi pengangguran masyarakat yang memiliki potensi bidang pertukangan kayu	Tidak memiliki peralatan perbengkelan yang memadai	2 Unit	Desa Rawajaya Kec. Tobelo	Dinas Sosial	Restorasi Pembangunan	Heni Moudy Leke, SE	I	I
46	Bantuan gerobag sampah	Terjadi penumpukan sampah dilorong yang tidak dapat dijangkau mobil sampah	Tidak tersedianya gerobak pengangkut sampah	5 Unit	Desa Rawajaya Kec. Tobelo	Dinas Lingkungan Hidup	Restorasi Pembangunan	Heni Moudy Leke, SE	I	I

55	Pembangunan jalan masuk	Kesulitan akses masuk ke tempat ibadah	Belum tersedianya jalan yang memadai	650 M	Desa Kupa-kupa RT 02 dan 06 Kec. Tobssel	Dinas PUPR	Demokrat	Janlis G Kitong	II	I
56	Pembuatan tanggul bantaran sungai kupa kupa	Terjadi luapan air sungai	Terjadi abrasi	400 M	Desa Kupa kupa selatan RT 01	Dinas PUPR	Demokrat	Janlis G Kitong	II	I
57	Pembangunan jalan masuk dan paving blok parkir tempat wisata kupa kupa	Kesulitan akses masuk ke tempat wisata	Kondisi jalan sudah rusak	51 M	Desa kupa-kupa RT 08	Dinas PUPR	Demokrat	Janlis G Kitong	II	I
58	Rehap atap dan plafon SDGMIH Kupa kupa	Kondisi tidak layak	Rusak berat	4 unit	Desa Kupa kupa selatan RT 03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Demokrat	Janlis G Kitong	II	I
59	Pembuatan jamban bagi masyarakat yang tidak mampu	Kesulitan fasilitas	Belum tersedianya fasilitas yang memadai	54 unit	Desa Kupa kupa dan kupa kupa selatan	Dinas PUPR	Demokrat	Janlis G Kitong	II	I
60	Rehap total pembantu puskesmas kali pitu	Kondisi tidak layak	Rusak berat	1 unit	Desa kalipitu RT 02	Dinas Kesehatan	Demokrat	Janlis G Kitong	II	I
61	Pembuatan jamban bagi masyarakat yang tidak mampu	Kesulitan fasilitas	Belum tersedianya fasilitas yang memadai	62 unit	Tobelo Tengah	Dinas PUPR	Demokrat	Janlis G Kitong	II	I
62	Bantuan pengadaan mobuler untuk paud/tk	Kesulitan fasilitas	Belum tersedianya fasilitas yang memadai	1 paket	Desa kalipitu RT 06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Demokrat	Janlis G Kitong	II	I
63	Pembangunan drainase	Terjadi genangan air	Belum tersedianya saluran air	2000 M	Desa kalipitu RT 03	Dinas PUPR	Demokrat	Janlis G Kitong	II	I
64	Pengadaan pupuk untuk kelompok tani	Kesulitan fasilitas	Belum tersedianya pupuk yang memadai	7 Kel	Desa kalipitu RT 01-06	Dinas pertanian	Demokrat	Janlis G Kitong	II	I

65	Pembuatan talud	Sering terjadi longsor dan mencega abrasi	Untuk menahan terjadi abrasi air laut	300 M	Desa Pitu – desa Lina ino	Dinas PUPR	Demokrat	Janlis G Kitong	II	I
66	Peningkatan jalan belakang (hotmix)	Jalan alternative lingkaran desa	Memperjua aktifitas dan jalur transportasi	1000 M	Desa Leleoto	Dinas PUPR	Demokrat	Janlis G Kitong	II	I
67	Pembuatan talud	Sering terjadi longsor dan mencega abrasi	Untuk menahan terjadi abrasi air laut	200 M	Desa Leleoto	Dinas PUPR	Demokrat	Janlis G Kitong	II	I
68	Pembuatan talud	Sering terjadi longsor dan mencega abrasi	Untuk menahan terjadi abrasi air laut	300 M	Desa Yaro	Dinas PUPR	Demokrat	Janlis G Kitong	II	I
69	Pembuatan jembatan hiha kaliupa	Jembatan penghubung	Memperjua aktifitas dan jalur transportasi	1	Desa Kaliupa	Dinas PUPR	Demokrat	Janlis G Kitong	II	I
70	Hotmix	rusak	pengaspalan	2 Km	Desa Yaro RT 2	Dinas PUPR	Restorasi Pembangunan	Aurelia Indah Mole, SE	II	I
71	swering	Terjadi abrasi pantai sehingga air laut sudah mendekati rumah warga	Apabila swering dibangun maka abrasi akan kurang	200 M	Desa Yaro	Dinas PUPR	Restorasi Pembangunan	Aurelia Indah Mole, SE	II	I
72	Pembangunan Sekolah SMP	Belum ada sekolah SMP di desa yaro	Siswa SMP tidak sekolah diluar desa yaro	Belum ada gedung	Desa Yaro	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Restorasi Pembangunan	Aurelia Indah Mole, SE	II	I
73	Pembangunan Sekolah SMA	Belum ada sekolah SMA di desa yaro	Siswa SMA tidak sekolah diluar desa yaro	Belum ada gedung	Desa Yaro	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Restorasi Pembangunan	Aurelia Indah Mole, SE	II	I

74	Pembangunan rumah guru SD	Belum adanya fasilitas rumah guru SD di desa yaro	Agar guru dari luar dapat tinggal dan mengajar di SD yaro	Belum ada gedung	Desa Yaro	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Restorasi Pembangunan	Aurelia Indah Mole, SE	II	I
75	Pengadaan mesin parut	Untuk kebutuhan pedagang kecil	Perlu adanya mesin parut untuk menambah kebutuhan pedagang kecil	2 mesin	Desa Yaro	Dinas Koperasi dan UKM	Restorasi Pembangunan	Aurelia Indah Mole, SE	II	I
76	Pengadaan alat rumah tangga (oven vorno)	Untuk kebutuhan pedagang kecil bagi ibu ibu pembuatan roti	Perlu adanya oven untuk menambah kebutuhan ibu ibu pedagang kecil	8 RT	Desa Yaro	Dinas Koperasi dan UKM	Restorasi Pembangunan	Aurelia Indah Mole, SE	II	I
77	Pembangunan drainase	Waktu hujan air selalu meluap di pemukiman warga RT 1 dan 2	Perlu dibuat drainase agar dapat menahan luapan air	450 M	Desa kakara B RT 1 dan 2	Dinas PUPR	Restorasi Pembangunan	Aurelia Indah Mole, SE	II	I
78	Pembangunan swering dan rehab swering	Terjadi abrasi pantai di desa kakara B saat air pasang disertai gelombang dan sudah mendekati rumah warga	Apabila swering dibangun dan rehab maka abrasi akan kurang	-	Desa Kakara B	Dinas PUPR	Restorasi Pembangunan	Aurelia Indah Mole, SE	II	I
79	hotmix	rusak	pengaspalan	1,5 Km	Desa Kakara B	Dinas PUPR	Restorasi Pembangunan	Aurelia Indah Mole, SE	II	I
80	Rehab kantor desa	Bangunan kantor desa yang rusak sedang	Kerusakan kantor desa yang dapat mengganggu pelayanan masyarakat	1 bangunan	Desa Kakara B	Dinas PUPR	Restorasi Pembangunan	Aurelia Indah Mole, SE	II	I

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD NOMOR // TENTANG POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA UTARA MASA PERSIDANGAN KE SATU TAHUN 2021-2022

NO	Program/kegiatan	Permasalahan	Asumsi	Volume	Lokasi	OPD terkait	Pengusul			
							Fraksi	Nama Anggota	Komisi	Dapil
1	Peningkatan jalan Desa (hotmix)	Menyulitkan aktifitas masyarakat karena jalannya sudah berlubang	Perlu peningkatan jalan desa	2 KM	Desa Kapa-Kapa	Dinas PUPR	Demokrat	BERTHY SIKAWY, SE	I	II
2	Bantuan Rumah tidak layak huni (Semen dan Seng)	Rumah masyarakat yang rusak yang di huni oleh masyarakat yang tidak mampu	Perlu untuk di renovasi, agar masyarakat dapat menikmati rumah yang layak	8 Rumah	Desa Kapa-Kapa	Dinas PUPR	Demokrat	BERTHY SIKAWY, SE	I	II
3	Bantuan pembuatan Tower jaringan	Belum ada jaringan telekomunikasi	Agar dapat membantu masyarakat dalam berkomunikasi menggunakan telepon seluler	1 Unit	Desa Posi-Posi	Dinas PUPR	Demokrat	BERTHY SIKAWY, SE	I	II
4	Pembuatan Talud	Sering terjadi longsor yang mengakibatkan pohon-pohon dan mencega abrasi	Untuk menahan terjadinya abrasi air laut	100 m	Desa Posi-Posi	Dinas PUPR	Demokrat	BERTHY SIKAWY, SE	I	II
5	Pembuatan jalan alternatif	Menyulitkan masyarakat apabila ada hajatan (Duka atau Nikahan) yang harus menggunakan jalan utama	Agara dapat membantu masyarakat dalam melakukan aktifitas	-	Desa Posi-Posi	Dinas PUPR	Demokrat	BERTHY SIKAWY, SE	I	II
6	Jalan tani	Kesulitan mobilisasi hasil pertanian	Belum tersedianya jalan yang memadai	2000 M	Desa Pune RT 01	Dinas PUPR	Restorasi Pembangunan	Fahmin Djuba, ST	III	II
7	Pembangunan jalan masuk ke tempat wisata	Kesulitan akses masuk ke tempat wisata	Kondisi jalan sudah rusak	1000 M	Desa Pune	Dinas PUPR	Restorasi Pembangunan	Fahmin Djuba, ST	III	II
8	Pengadaan alat pertukangan	Kurangnya fasilitas	Belum tersedianya alat tukang yang memadai	1 paket	Desa Pune	Dinas Koperasi dan UKM	Restorasi Pembangunan	Fahmin Djuba, ST	III	II

[illegible]

16	Rehabilitasi 6 ruang kelas SD Negeri Tate	Sudah lama tidak layak dan tidak menunjang aktifitas belajar mengajar	Rehabilitasi ruang kelas dapat menunjang siswa belajar dengan baik	6 Ruang	Desa Tate Kec. Loloda Utara	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PDIP	Irwan Jam, SH	III	II
17	Rehabilitasi plafon mesjid Tate	Sudah lama belum di perbaiki membuat kecemasan warga bila beribada	Rehabilitasi maka warga merasa nyaman dalam beribada	1 Ruang	Desa Tate Kec. Loloda Utara	BKAD	PDIP	Irwan Jam, SH	III	II
18	Pembangunan talud	Terjadi abrasi laut	Membuat talud penahan ombak	150 M	Desa Jere Kec. Galela Utara	Dinas PUPR	PDIP	Irwan Jam, SH	III	II
19	Rehabilitasi polindes	Tidak layak dihuni para petugas medis	Rehabilitasi agar tim medis bias menempati	1 paket	Desa Jere Kec. Galela Utara	Dinas Kesehatan	PDIP	Irwan Jam, SH	III	II
20	Peningkatan jalan	Menghambat aktifitas warga	Dibuatnya peningkatan jalan membuat warga merasa nyaman	500 M	Desa Makete Kec. Galela Barat	Dinas PUPR	PDIP	Irwan Jam, SH	III	II
21	Peningkatan jalan lingkaran desa	Menghambat aktivitas warga yang melewatinya	Warga yang melewati merasa nyaman	1000 M	Desa Gotalamo Kec. Galela Barat	Dinas PUPR	PDIP	Irwan Jam, SH	III	II
22	Peningkatan jalan lingkungan	Jalan masih berbatu membuat aktifitas warga terganggu	Peningkatan jalan lingkungan maka warga merasa nyaman	500 M	Desa Makete Kec. Galela Barat	Dinas PUPR	PDIP	Irwan Jam, SH	III	II
23	Pembangunan jalan produksi	Warga masih kesulitan mengeluarkan hasil pertanian	Mempermudah akses mengeluarkan hasil pertanian	2 Km	Desa Kira Kec. Galela Barat	Dinas PUPR	PDIP	Irwan Jam, SH	III	II
24	Pembangunan drainase	Musim hujan air meluap di pemukiman warga	Dibangunnya drainase agar dapat menahan luapan air	500 M	Desa Kira Kec. Galela Barat	Dinas PUPR	PDIP	Irwan Jam, SH	III	II
25	Pembangunan mesjid baru nurul iman	Direhabilitasi karena sudah tidak layak untuk digunakan	Direhabilitasi warga pun dapat menggunakan tempat ibada	200 juta	Desa Kira Kec. Galela Barat	BKAD	PDIP	Irwan Jam, SH	III	II

34	Peningkatan jalan lingkar desa	Masyarakat masih terganggu karena belum ada peningkatan jalan	Masyarakat merasa nyaman jika sudah di perbaiki atau peningkatan jalan	1000 M	Desa Soatabaru	Dinas PUPR	PDIP	Irwan Jam, SH	III	II
35	Jalan tani	Beluam ada jalan tani	Membuat jalan tani untuk memudahkan para petani	1000 M	Desa Samuda	Dinas PUPR	PDIP	Irwan Jam, SH	III	II
36	Penambahan 3 ruangan belajar SD	Siswa masih merasa terganggu karena masih belum ada penambahan ruang kelas yang baru	Dengan adanya penambahan ruang kelas siswapun merasa nyaman dalam proses belajar mengajar	3 ruang	Desa samuda	Dinas pendidikan dan kebudayaan	PDIP	Irwan Jam, SH	III	II
37	Peningkatan jalan lingkar desa	Masyarakat masih merasa terganggu karena jalan masih belum baik	Dengan adanya peningkatan jalan maka warga sudah merasa nyaman dalam beraktifitas	1000 M	Desa igobula kec. Galela selatan	Dinas PUPR	PDIP	Irwan Jam, SH	III	II
38	Pembanguna drainase	Karena sering terjadi peluapan air jika terjadi hujan	Dengan adanya drainase yang di bangun, maka dapat menahan debit air saat hujan turun	500 M	Desa igobula	Dinas PUPR	PDIP	Irwan Jam, SH	III	II
39	Pembangunan jalan produksi	Warga sering mengeluh karena belum adanya pembuatan jalan produksi	Dengan di produksinya jalan maka wargapun merasa nyaman dalam melakukan aktifitas.	1000 M	Desa igobula	Dinas PUPR	PDIP	Irwan Jam, SH	III	II
40	Rehabilitasi 3 ruang kelas SD Muhammadiyah igobula	Para siswa masih merasa terganggu karena belum di rehabilitasinya 3 ruang kelas	Dengan adanya rehabilitasi 3 ruang kelas, maka para siswapun adapat menikmatinya dengan nyaman	200 juta	Desa igobula	Dinas pendidikan	PDIP	Irwan Jam, SH	III	II

[illegible]

48	Pembuatan talud	Saat air pasang sering terjadi abrasi	Agar tirhindar dari ancaman abrasi	100 M	Desa Salimuli Kec Galela Utara	Dinas PUPR	Golkar	Samsul Bahri Umar, S.Ag	II	II
49	Pembuatan gorong gorong	Terjadi genangan air diwaktu musim hujan	Tidak ada saluran air	100 M	Desa Tutumaloleo Kec Galela Utara	Dinas PUPR	Golkar	Samsul Bahri Umar, S.Ag	II	II
50	Pembuatan bronjong sungai lalonga	Terjadi luapan air sungai	Terjadi Abrasi	400 M	Desa Lalonga Kec Galela Utara	Dinas PUPR	PKB	Fahmi Musa, S.Pd	II	II
51	Pembuatan tanggul bantaran air laut desa Lalonga	Terjadi luapan air laut	Terjadi Abrasi	400 M	Desa Lalonga Kec Galela Utara	Dinas PUPR	PKB	Fahmi Musa, S.Pd	II	II
52	Bantuan pembangunan rumah ibadah	Belum terselesainya rumah ibada	Belum tersedia anggaran pembangunan	1 unit mesjid	Desa Lalonga Kec Galela Utara	BKDA	PKB	Fahmi Musa, S.Pd	II	II
53	Bantuan pembangunan rumah ibadah	Belum terselesainya rumah ibada	Belum tersedia anggaran pembangunan	1 unit Gereja	Desa Saluta Kec Galela Utara	BKDA	PKB	Fahmi Musa, S.Pd	II	II
54	Bibit pala untuk kelompok tani	Belum tersedianya bibit pala yang memadai	Pengadaan Bibit pala	5000 Pohon	Desa Saluta Kec Galela Utara	Dinas Pertanian	PKB	Fahmi Musa, S.Pd	II	II
55	Bibit pala untuk kelompok tani	Belum tersedianya bibit pala yang memadai	Pengadaan Bibit pala	5000 Pohon	Desa Limau Kec Galela Utara	Dinas Pertanian	PKB	Fahmi Musa, S.Pd	II	II
56	Pembangunan jalan belakang	Kesulitan akses masuk	Belum tersedianya jalan yang memadai	1000 M	Desa Seki Kec Galela Selatan	Dinas PUPR	PKB	Fahmi Musa, S.Pd	II	II
57	Bantuan pembangunan rumah ibadah	Belum terselesainya rumah ibada	Belum tersedia anggaran pembangunan	1 unit Gereja	Desa Bale Kec Galela Selatan	BKAD	PKB	Fahmi Musa, S.Pd	II	II

[illegible]

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD NOMOR 170/6/2020 TENTANG POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA UTARA MASA PERSIDANGAN KE SATU TAHUN 2021-2022

NO	Program/kegiatan	Permasalahan	Asumsi	Volume	Lokasi	OPD terkait	Pengusul			
							Fraksi	Nama Anggota	Komisi	Dapil
1	Peningkatan jalan (hotmix) jln PLN, pekuburan desa Ngofakiaha	Kondisi jalan yang rusak sehingga menyulitkan masyarakat mengakses jalan ke PLN dan Pekuburan	Perlu dihotmix agar memudahkan masyarakat	1,5 Km	Desa Ngofakiaha Kec. Malifut	Dinas PUPR	PKB	Yusri Bailussy, S.Sos	III	III
2	Pembuatan jalan hotmix	Belum ada jalan menuju pondok pesantren AR.RAHMAN	Perlu dibuat jalan untuk akses menuju pandok pesantren AR.RAHMAN	500 M	Desa Sabale Kec. Malifut	Dinas PUPR	PKB	Yusri Bailussy, S.Sos	III	III
3	Peningkatan jalan (hotmix) kilo 8 Desa Sabale	Kondisi jalan yang rusak berat sehingga perlu dihitmix	Peningkatan jalan untuk memudahkan aktifitas masyarakat	1 Km	Desa Sabale Kec. Malifut	Dinas PUPR	PKB	Yusri Bailussy, S.Sos	III	III
4	Peningkatan jalan panabaru desa sabale	Kondisi jalan yang rusak berat sehingga perlu dihitmix	Peningkatan jalan untuk memudahkan aktifitas masyarakat	1 Km	Desa Sabale Kec. Malifut	Dinas PUPR	PKB	Yusri Bailussy, S.Sos	III	III
5	Jalan tani	Belum ada jalan tani	Menunjang aktifitas petani	5 Km	Desa Biang Kec. Kao Utara	Dinas PUPR	PKPI	Benoni Laranga	III	III
6	Saluran air (drainase)	Belum ada drainase sehingga air tergenang	Perlu dibuat saluran air sehingga air tidak tergenang	2 Km	Desa Biang Kec. Kao Utara (Rt 01, RT02 RT 04	Dinas PUPR	PKPI	Benoni Laranga	III	III
7	Jalan tani	Belum ada jalan tani	Menunjang aktifitas petani	1,5 Km	Desa Wangeotak Kec Malifut	Dinas PUPR	PKPI	Benoni Laranga	III	III
8	Sirtu jalan desa	Kondisi jalan yang sudah rusak sehingga menyulitkan masyarakat dalam aktifitas	Jalan desa perlu disirtu agar dapat membantu menunjang aktifitas masyarakat desa	1 Km	Desa Wangeotak Kec Malifut	Dinas PUPR	PKPI	Benoni Laranga	III	III

[illegible]

16	Penambahan tenaga pengajar	Kurang efektif proses belajar mengajar	Meningkatkan efektifitas program belajar mengajar	6 orang	Desa Torawat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Demokrat	Chatrine Soputan, S.AP	II	III
17	Penambahan ruang kelas	Proses belajar mengajar terganggu karena kelas digabung	Siswa belajar sesuai dengan tingkatan kelas (tidak ada penggabungan kelas	4 ruang	Desa Torawat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Demokrat	Chatrine Soputan, S.AP	II	III
18	Renovasi gedung sekolah paud	Gedung sekolah rusak karena kebakaran	Siswa dapat belajar dengan nyaman dan lebih fokus	3 ruang	Desa Torawat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Demokrat	Chatrine Soputan, S.AP	II	III
19	Saluran irigasi	Terganggunya aktifitas pertanian	Mempermuda petani dalam melakukan aktifitas pertanian	700 M	Desa Torawat	Dinas PUPR	Demokrat	Chatrine Soputan, S.AP	II	III
20	Peningkatan jalan (jalan Tani) tanah ke sirtu	Akses dari desa menuju kebun sulit	Mempermuda aktifitas warga menuju kebun	250 M	Desa Torawat	Dinas PUPR	Demokrat	Chatrine Soputan, S.AP	II	III
21	Peningkatan jalan dari sirtu ke hotmix	Sulitnya akses keluar masuk	Mempermuda aktifitas dan jalur transportasi	4 Km	Desa Gulo	Dinas PUPR	Demokrat	Chatrine Soputan, S.AP	II	III
22	Penambahan ruang kelas Paud tunas anugera Gulo	Proses belajar mengajar terganggu karena terbatasnya ruang kelas	Siswa dapat belajar dengan nyaman dan lebih fokus	2 ruang	Desa Gulo	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Demokrat	Chatrine Soputan, S.AP	II	III
23	Penambahan ruang kelas SD Negeri Gulo	Proses belajar mengajar terganggu karena terbatasnya ruang kelas	Siswa dapat belajar dengan nyaman dan lebih fokus	4 ruang	Desa Gulo	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Demokrat	Chatrine Soputan, S.AP	II	III

32	Pengadaan fasilitas sekolah	Belum tersedianya akses internet dan WI-FI sekolah	Perlu pengadaan komputer dan WI-FI sekolah untuk mempermudah pengiriman data online	1 paket	Desa Doro kec kao utara	Dinas pendidikan	Nasdem	Selvi tjuluku	I	III
33	Pengadaan fasilitas sekolah dasar wangeotak inpres wangeotak	Fasilitas mobiler sekolah yang masih kurang memadai	Perlu pengadaan fasilitas sekolah agar menunjang aktifitas belajar mengajar	1 paket	Desa Wangeotak kec. malifut	Dinas pendidikan	Nasdem	Selvi tjuluku	I	III
34	Pengadaan fasilitas sekolah dasar wangeotak inpres, SD Popon, kec, kao barat	Fasilitas mobiler sekolah yang masih kurang memadai	Perlu pengadaan aktifitas sekolah agar menunjang aktifitas	1 paket	Desa popon kec. Kao barat	Dinas pendidikan	Nasdem	Selvi tjuluku	I	III
35	talut	Abrasi	Pembuatan Talut Sebelum Merusak Rumah Warga	1 paket	Desa patang kec. kao	Dinas PUPR	Nasdem	Selvi tjuluku	I	III
36	Pembangunan jembatan	Akses jalan anak desa toboulamo dan takimo	Memperlancar akses jalan masyarakat desa	1 paket	Desa Toboulamo kec kao barat	Dinas PUPR	Nasdem	Selvi tjuluku	I	III
37	Pengadaan ruang lab	Tidak ada ruang lab	Perlu dibangun ruang lab untuk SMP Toboulamo	1 ruang	Desa Toboulamo kec kao barat	Dinas pendidikan	Nasdem	Selvi tjuluku	I	III
38	Pengadaan fasilitas mobiler sekolah dasar toboulamo	Belum tersedianya mobiler	Perlu pengadaan mobiler SD toboulamo	1 paket	Desa Toboulamo kec kao barat	Dinas pendidikan	Nasdem	Selvi tjuluku	I	III
39	Rehap ruang puskesmas	Ruang puskesmas rusak sedang	Perlu di perbaiki lantai pada ruangan puskesmas desa makeiling	4 Ruang	Desa Makeiling Kao Teluk	Dinas kesehatan	Golkar	Asrul Suhaibun	II	III

[illegible]



PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Kawasan Pemerintahan No 1B

T O B E L O

Web: <http://www.halmaherautara.com>

Web: dprdhalut.wordpress.com

Email: setwanhalut@gmail.com

PRODUK PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NO	NOMOR	JUDUL RANPERDA	TGL PERSETUJUAN	KET
1	Keputusan DPRD Kab. Halut Nomor: 170/03/2021	Persetujuan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Daerah Kab. Halut No 4 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM	29 Maret 2021	
2	Keputusan DPRD Kab. Halut Nomor: 170/04/2021	Persetujuan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Dalam Lingkup Metrologi Legal	29 Maret 2021	
3	Keputusan DPRD Kab. Halut Nomor: 170/05/2021	Persetujuan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan	29 Maret 2021	
4	Keputusan DPRD Kab. Halut Nomor: 170/12/2021	Persetujuan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ke Delapan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara	20 Desember 2021	
5	Keputusan DPRD Kab. Halut Nomor: 170/13/2021	Persetujuan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	30 Desember 2021	